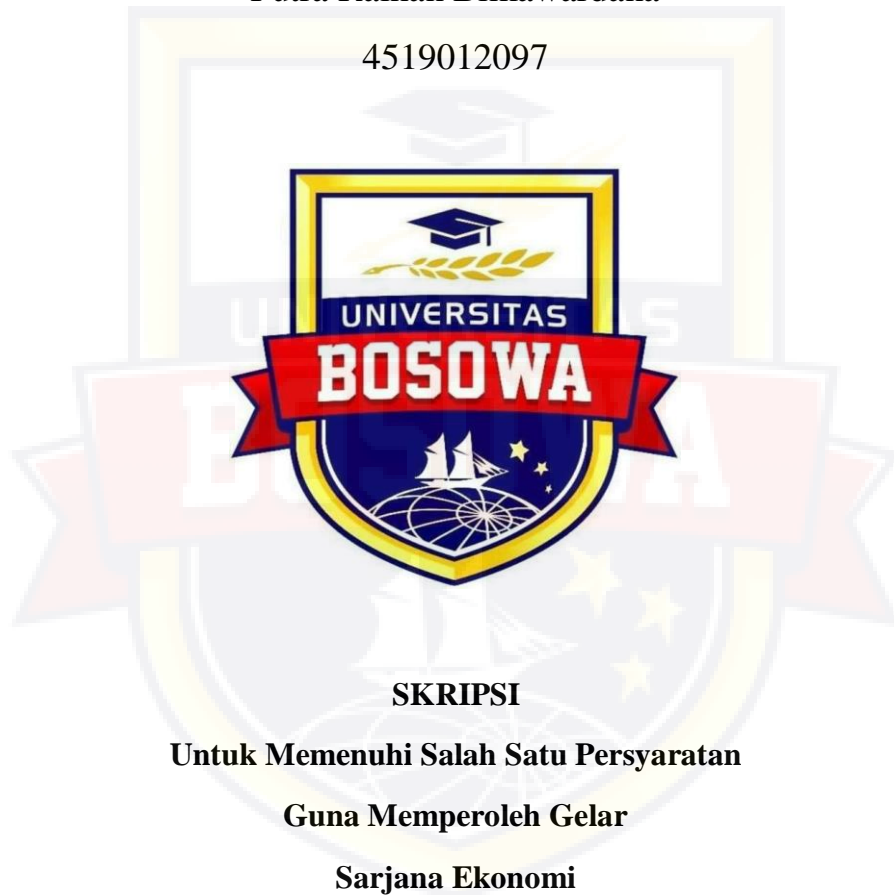


**ANALISIS EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI TERHADAP ANGGARAN
BELANJA DAERAH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun Oleh:

Putra Raihan Bimawardana

4519012097



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Efektivitas, dan Efisiensi Terhadap Anggaran
Belanja Dacrah Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Putra Raihan Bimawardana

Nomor Stambuk : 4519012097

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

 **Dr. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si, MH**  **Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM**

Mengetahui dan Mengesahkan


Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar


Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Manajemen

 **Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., M.M, CSBA**

 **Ahmad Jumarding, SE., M.M**

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Raihan Bimawardana

Nim : 4519012097

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Judul : Analisis Efektivitas, dan Efisiensi Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar,

Mahasiswa yang bersangkutan




Putra Raihan Bimawardana

PRAKATA

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis hanturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karuna-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Bosowa Makassar, dengan judul **“Analisis Efektivitas, dan Efisiensi Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan”**.

Penulis memahami bahwa dalam penelitian skripsi ini masih memiliki kekurangann dan keterbatasan dalam segala hal. Oleh sebab ini penulis menerima kritikan konstruktif dari para pembaca guna penyempurnaan isi maupun teknik penulisan skripsi yang baik dan benar.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada banyak pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini terutama Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya,S.T.,M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abubakar,SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
3. Ibu Indrayani Nur,SE.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
4. Bapak Ahmad Jumarding,SE.,MM. selaku ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa
5. Bapak Dr. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan motivasi serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bertambah.

7. Kepada Orang tua tercinta, Bapak Abd. Jalil dan Ibu Siti Aisyah terimakasih sudah memberikan kasih sayang dan dukungan baik secara moral maupun material disertai doa yang ikhlas, bimbingan serta motivasi dan semangat yang membangun bagi anaknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada kakak penulis Putri Ija Ayu Listia Ningsih dan adik penulis Dini Ramadhani Putri terimakasih atas do'a dan dukungannya.
9. Teman-teman Seperjuangan Rindi Antika, Andi Al Hijas, Melsi Pamilangan, Indarwati, Nur Ariska, Amalia Ramadhani, Ginda Limbong Ma'dika, Andi Ulfah Ramadhani, semua sahabat team mabar dan teman-teman kkn, yang selalu menghibur dan memberi semangat kepada penulis dikala penat menghampiri.
10. Teman-teman penulis kelas Manajemen C (MAGIC) Angkatan 2019 yang begitu luar biasa memberikan kenangan yang indah selama masa perkuliahan.
11. Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menjadi tempat penelitian, penulis ucapkan terima kasih telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terimakasih pula kepada pihak yang belum saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menyangi dan mengenal penulis, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis selalu berusaha memperbaiki leboh baik lagi kedepannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu semua pihak yang memerlukannya.

Makassar

Putra Raihan Bimawardana

Abstrak

Putra Raihan Bimawardana, 2023. Skripsi. Analisis Efektivitas, dan Efisiensi Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing Oleh Dr. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si, MH dan Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran belanja daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan Penelitian kuantitatif dengan metode Analisis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat time series dari data 2020-2022. Metode statistik yang dipakai dalam penelitian adalah teknik Efektivitas Efisiensi.

Hasil penelitian ini adalah tingkat efektivitas yang dicapai anggaran belanja daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan selama 2020-2022 mengalami perubahan yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2020 tingkat efektivitasnya menunjukkan hasil yang cukup efektif yaitu 85,28% dan pada tahun 2021 tingkat efektivitasnya menunjukkan hasil cukup efektif yaitu 85,35% dan tahun 2022 tingkat efektivitasnya menunjukkan hasil efektif yaitu 95,43%. Sedangkan tingkat efisiensi pada tahun 2020 menunjukkan hasil sangat efisien yaitu 58,99%, dan tahun 2021 tingkat efisiensi menunjukkan hasil kurang efisien yaitu 97,06% dan pada tahun 2022 menunjukkan hasil kurang efisien yaitu 90,14%.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, dan Anggaran Belanja Daerah

Abstract

Putra Raihan Bimawardana, 2023. Thesis. Analysis of Effectiveness, and Efficiency of Regional Expenditure Budget at the Cultural and Tourism Office of South Sulawesi Province (guided by Dr. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si, MH and Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM).

This study aims to determine and analyze the level of effectiveness and efficiency of the regional budget at the Culture and Tourism Office of South Sulawesi Province. This research uses quantitative research with descriptive analysis method. With data collection techniques in the form of documentation and interviews. This study uses secondary data that is time series from 2020-2022 data. The statistical method used in research is the Efficiency Effectiveness technique.

The result of this study is that the level of effectiveness achieved by the regional budget of the South Sulawesi Provincial Culture and Tourism Office during 2020-2022 has undergone very fluctuating changes. In 2020 the effectiveness rate showed quite effective results of 85.28% and in 2021 the effectiveness rate showed quite effective results of 85.35% and in 2022 the effectiveness rate showed effective results of 95.43%. While the efficiency rate in 2020 showed very efficient results at 58.99%, and in 2021 the efficiency rate showed less efficient results at 97.06% and in 2022 showed less efficient results at 90.14%.

Keywords : Effectiveness, Efficiency, and Regional Budget

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Lingkup Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	8
A. Deskripsi Teori	8
1. Pengertian Manajemen Keuangan	8
2. Fungsi Manajemen Keuangan	8
3. Tujuan Manajemen Keuangan.....	9
4. Keuangan Daerah	10
5. Anggaran.....	12
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	25
7. Efektivitas	27

8. Efisiensi.....	30
9. Belanja	33
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pikir.....	40
D. Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Instrumen Penelitian	43
E. Variabel Penelitian.....	44
F. Jenis dan Sumber Data.....	44
G. Teknik Pengumpulan Data.....	45
H. Teknik Analisis Data	46
I. Definisi Operasional	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Profil Dinas Kebudayaan Dan Parwisata Provinsi Sulawesi Selatan	50
2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan ...	51
3. Struktur Organisasi	52
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	53
1. Deskripsi Data	53
2. Analisis Data	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tahun 2020-2022	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas	47
Tabel 3.2 Kriteria Efisiensi	48
Tabel 4. 1 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022	54
Tabel 4. 2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020- 2022.....	54
Tabel 4. 3 Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan	56
Tabel 4. 4 Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	40
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Penelitian.....	65
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	66
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020	67
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021	70
Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efek dari krisis yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini menyebabkan pemerintah di negara-negara seluruh dunia memperbaiki proses mereka dalam hal performa daya guna dan efisiensi perekonomian. Dalam pengertian ini analisa perbandingan dari efisiensi sektor publik adalah poin awal dalam mempelajari peran atau tugas dari efisiensi, efektivitas dan performa yang berhubungan dengan perekonomian pemerintahan dari penggunaan sumber daya oleh manajemen publik untuk mendapatkan keobyektifan dari pemulihan ekonomi dan kepentingan pengembangan perekonomian nasional pada jangka menengah dan jangka panjang. (Imanuel Pangkey, Sherly Pinatik, 2015).

Pada umumnya setiap instansi negeri berupaya seoptimal mungkin mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam kegiatan instansi, semua bagian seperti pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan akan menjadi satu kesatuan kerja yang harus saling mendukung dalam proses pencapaian tujuan. Untuk mengkoordinasikan kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk menyusun strategi-strategi sebagai petunjuk dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerjanya. (Julita, 2011).

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran. (Julita, 2011).

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektivitas membandingkan antara outcome dengan output suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat (Mahmudi, 2019).

Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Konsep efisiensi hampir sama dengan produktivitas suatu organisasi program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output sebesar-

besarnya. Efisiensi berarti pembelanjaan anggaran secara cermat (spending well) (Mahmudi, 2019).

Efisiensi dan efektivitas sangat diperlukan dalam merealisasikan anggaran dinas. Dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang baik, itu berarti bahwa program – program pemerintah dijalankan sesuai budget awal. Efisiensi dan efektivitas merupakan isu yang umum bagi instansi pemerintah. Banyak instansi pemerintah yang berusaha untuk mencapai kriteria efektif dan efisien dalam penyerapan anggaran. Namun untuk mencapai kriteria tersebut bukan hal yang mudah. Instansi pemerintah harus merealisasikan budget yang telah ditetapkan. Apabila budget tidak terserap dengan baik, maka kriteria efektif dan efisien tidak akan tercapai.

Peningkatan kebutuhan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah telah mendorong perhatian masyarakat terhadap manfaat yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut. Hal ini mendorong perlunya pengukuran kinerja untuk para penyelenggara Negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja mereka dalam periode tertentu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk melihat efektivitas tersebut, diperlukan data-data anggaran yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

TABEL 1. 1
DATA TARGET DAN REALISASI PAD DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROV. SULSEL TAHUN 2020-2022

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD
2020	35.699.517.630	41.860.449.745
2021	43.520.457.368	50.990.553.238
2022	38.372.882.462	40.211.960.904

Sumber : Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan uraian diatas melihat begitu sangat pentingnya anggaran belanja bagi suatu instansi dalam mengalokasikan sumber dana yang dibelanjakan agar sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Efektivitas, dan Efisiensi Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan**".

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Efektivitas Anggaran Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
2. Apakah Efisiensi Anggaran Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
3. Apakah Efektivitas, dan Efisiensi Anggaran Berpengaruh Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Efektivitas Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Efisiensi Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Efektivitas, dan Efisiensi Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

D. Manfaat Penelitian

Berikut fungsi yang diinginkan di hasil penelitian berikut adalah :

1. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai penyusunan anggaran belanja terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pada instansi pemerintah dan sebagai bahan masukan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai salah satu syarat bagi penulis agar dapat meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Bosowa Makassar.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Dapat memberikan masukan dalam meningkatkan kinerja pegawai dan juga sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam hal penggunaan anggaran belanja.

3. Bagi Universitas Khususnya Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Bermanfaat untuk pengembangan ilmu di Universitas Bosowa Makassar, dan dapat di jadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan materi efektivitas dan efisiensi anggaran belanja.

E. Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar yang berlokasi di Gedung Mulo Jl. Jend. Sudirman No.23. Penelitian ini berfokus pada Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan proposal ini maka penulis membaginya dalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, yakni sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dilakukan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (grand theory) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kuantitatif. Keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti. Bab ini juga memuat kerangka pikir berisi gambaran penelitian yang akan dilakukan untuk masing-masing variabel dan hipotesis penelitian.

Bab ketiga, menjelaskan tentang lokasi dan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional.

Bab keempat, membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian serta hasil pengujian dari setiap variabel.

Bab kelima, membahas mengenai kesimpulan & saran penelitian terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dalam suatu instansi atau perusahaan yaitu untuk mengatur lalu lintas keuangan dengan biaya semurah mungkin dan mengoptimalkan dana suatu instansi atau perusahaan secara efisien, seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno (2021:3), yaitu :

“Manajemen Keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien”.

Menurut Irham Fahmi (2013:2), mengemukakan bahwa:

“Manajemen Keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas manajemen keuangan dapat disimpulkan sebagai aktivitas dalam suatu instansi atau perusahaan dalam mengelola dana secara efisien agar dapat tercapainya suatu tujuan dalam suatu

2. Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2012:5), yaitu :

1. Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang.

2. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan ini sering juga disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta bagian usahanya.

3. Keputusan Dividen

Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan :

1. Besarnya presentase laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividend
2. Stabilitas dividen yang dibagikan
3. Dividen saham (stock dividend)
4. Pemecahan saham (stock split)
5. Penarikan Kembali saham yang beredar, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.

3. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan menurut Sutrisno (2012;4) adalah untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik.

Kemakmuran para pemegang saham diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya harga saham, yang merupakan pencerminan dari keputusan-keputusan investasi, pendanaan dan kebijakan dividen.

4. Keuangan Daerah

Sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus Menurut Halim (2012) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat maka keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara.

Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.07/201. Daerah harus

menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah. Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis Informasi Keuangan Daerah (IKD) yang disampaikan oleh Daerah kepada Pemerintah mencakup:

- a. APBD
- b. Perubahan APBD
- c. Laporan Realisasi APBD Semester I
- d. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 pasal 3, pengelolaan keuangan daerah diatur dengan kekuasaan pengelolaan daerah, asas umum dan APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD (Balai Layanan Umum Daerah).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. (Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan SKPD). LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan

anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai selama pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi.

5. Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.

Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Mardiasmo (2009:61), mendefinisikan anggaran merupakan penyertaan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor 2 menyatakan definisi

anggaran yaitu: anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Definisi lain yang dikemukakan oleh M. Marsono pada bukunya “Tata Usaha Perbendaharaan Republik Indonesia” dalam Halim dan Iqbal (2012:138) memberikan definisi bahwa anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.

Fauziah (2018:59) mendefinisikan anggaran sebagai pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Sujarweni (2015:32) menyatakan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam satu periode dan merupakan satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan yaitu:

1. Untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan.

2. Untuk membantu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan asas keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas.
3. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban manajemen sektor publik.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi keuangan di dalam laporan keuangan harus dapat memberikan manfaat seperti, meningkatkan akuntabilitas untuk para kepala daerah dan para pejabat pemda ketika mereka bertanggung jawab tidak hanya pada khas masuk dan khas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah, pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

- a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan organisasi pemerintahan meliputi : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang dibuat instansi pemerintah yang berisi mengenai pendapatan, pembiayaan dan belanja yang telah dilaksanakan selama periode tertentu. Pada hakekatnya penerapan prinsip anggaran berimbang adalah untuk menghindari terjadinya hutang pengeluaran, akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaannya. Apabila penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD tidak mampu membiayai keseluruhan pengeluaran, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan kemampuan penerimaan daerah yang realistis, baik berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan keuangan maupun pinjaman daerah. Di sisi lain, kelebihan target penerimaan tidak harus selalu dibelanjakan, tetapi dicantumkan dalam perubahan anggaran dalam pasal cadangan atau pengeluaran tidak tersangka, sepanjang tidak ada rencana kegiatan mendesak yang harus segera dilaksanakan.

Unsur – unsur yang ada dalam LRA adalah :

1. Belanja daerah
2. Pendapatan LRA
3. Transfer daerah

4. Surplus / defisit LRA
5. Pembiayaan
6. Sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran.

Dalam LRA terdapat informasi mengenai budget yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam RLA juga mencantumkan realisasi anggaran pada periode tersebut. Dengan adanya komponen tersebut, maka LRA dapat digunakan untuk menghitung efektivitas maupun efisiensi anggaran. Penghitungan tersebut dapat menggunakan cara dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya ataupun sebaliknya.

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam laporan realisasi anggaran menurut standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintah (2009;21) terdiri dari:

- a. Pendapatan (Basis Kas) adalah Hak penerimaan oleh Bendaharaan umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan (Basis Akruai) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

- c. Belanja (Basis Kas) adalah semua pengeluaran oleh bendaharaan umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali ke pemerintah.
- d. Belanja (Basis Akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- f. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali untuk atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran. Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- g. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Anggaran terbagi menjadi dua yaitu, anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung:

- a) Anggaran belanja langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung dapat berupa belanja pegawai/personalia, belanja barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
- b) Anggaran belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung dapat berupa belanja pegawai/gaji pegawai, belanja barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas (Muttaqin Hasyim, 2010).

b. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan banyak informasi terkait pendapatan, transfer, belanja, defisit, surplus, serta pembiayaan pada suatu entitas. Laporan realisasi anggaran mempunyai sejumlah manfaat yaitu, menyajikan informasi, mengenai alokasi, sumber, dan pemakaian sumber daya ekonomi, dapat digunakan untuk memprediksi sumber daya ekonomi untuk pendanaan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode berikutnya, dengan adanya data laporan tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi oleh pihak pengguna laporan terhadap keputusan yang akan dibuat. Dengan adanya laporan realisasi dan tersebut memberikan rincian terhadap catatan kondid keuangan

secara menyeluruh. Sehingga hal ini dijadikan sebagai sumber informasi paling akurat untuk mengetahui efektivitas perolehan pendapatan dan realisasi dari sumber daya ekonomi. Laporan tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk membandingkan pendapatan dari pemakaian anggaran apakah sudah selesai dengan peraturan UU atau belum. Laporan ini bermanfaat untuk mengambil keputusan soal alokasi sumber daya ekonomi lengkap dengan akuntabilitasnya pada periode mendatang.

c. Jenis-Jenis anggaran

Secara garis besar anggaran dapat diklasifikasikan menjadi berikut.

- a) Anggaran operasional dan anggaran modal (current vs capital budgets) berdasarkan jenis aktivitya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal.
- b) Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini juga sering dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), yaitu jenis pengeluaran yang sifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu set.
- c) Anggaran modal (capital modal) menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjannya atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan

sebagainnya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaan.

d) Anggaran berdasarkan pengesahan (tentative enacted budgets). Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi anggaran tentatif (tentative) dan anggaran enacted. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dan lembaga legislatif karena kemunculannya yang di picu anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

e) Anggaran dana umum versus anggaran dana khusus (general special budgets). Dalam pemerintahan, kekayaan negara (dana) dibagi menjadi umum dan dana khusus. Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum sehari-hari, sedangkan dana khusus dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya Debt Service Fund yang digunakan khusus untuk pembayaran utang. Anggaran untuk dana umum disebut anggaran dana umum (general budget) dan anggaran untuk dana khusus disebut anggaran dana khusus (special budget).

f) Anggaran tetap vs anggaran fleksibel (fixed vs flexible budget). Dalam anggaran tetap, apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya diawal tahun anggaran, jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, harga barang/jasa per unit telah ditetapkan. Namun, jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.

g) Anggaran eksekutif versus anggaran legislatif (executive versus legislative budget). Berdasarkan penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif (executive budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah, serta anggaran legislatif (legislative budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain itu, ada juga yang disebut anggaran bersama (joint budget), yaitu anggaran yang disusun secara bersama-sama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sementara itu, sebuah anggaran yang disusun oleh suatu komite khusus disebut anggaran komite (committee budget).

d. Siklus anggaran

a) Persiapan (preparation)

b) Persetujuan lembaga legislatif (legislative enactment)

- c) Administrasi (administration)
- d) Pelaporan (reporting)
- e) Pemeriksaan (post-audit)

Tahap persiapan dan perumusan sering ditunjukkan dengan peran utama eksekutif dan termasuk perencanaan yang menghubungkan rencana kerangka kerja fiskal jangka menengah dengan belanja setiap tahun, penyiapan prioritas, sumber, dan pembelanjaan, instruksi bagi lembaga pembuat anggaran untuk menyerahkan rancangan anggaran, serta tinjauan administratif terhadap dilakukan. permohonan anggaran. Tahap persiapan dan perumusan diperkirakan membutuhkan waktu antara 3-9 bulan sebelum tahun anggaran berjalan.

Tahap persetujuan adalah tahap dimana legislatif berperan dan ditandai dengan disampaikannya anggaran kepada lembaga legislatif atau dewan untuk dipertimbangkan. Tahap ini meliputi cakupan anggaran dan mutu dokumentasi yang diinginkan, cakupan otoritas persetujuan, penegasan legislatif terhadap penyesuaian anggaran, dan jadwal persidangan legislatif. Tahap persetujuan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan.

Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada periode tahun anggaran tahun anggaran berjalan. Tahap ini mencakup jaminan pengeluaran, mekanisme untuk memastikan akuntabilitas eksekutif terhadap kebijakan legislatif, pembagian secara adil, keleluasaan administratif, prosedur penyesuaian

pada tengah tahun, manajemen perbendaharaan, dan pengendalian keuangan. Tahap audit dan evaluasi adalah tahap verifikasi termasuk laporan pelaksanaan, verifikasi akun secara independen, pelaporan kinerja keuangan, dan keterbukaan publik.

Siklus anggaran harus didukung oleh kalender anggaran yang menetapkan tahapan dari tiap elemen dalam siklus anggaran. Kelengkapan kalender mencerminkan bahwa baik dewan maupun pihak administratif dibuatkan jadwal untuk penyesuaian seluruh tahapan. Hal tersebut mengidentifikasi peranan serta tanggung jawab aktor dan lembaga pada tiap tahap sebagaimana pula informasi dan prosedur yang dibutuhkan pada penyelesaian setiap tahap. Praktek terbaik menyarankan keterbukaan dalam proses anggaran sebagai sarana untuk menambah hasil yang akan didapatkan.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, APBD dapat di definisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggitingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah, 1995).

APBD adalah suatu anggaran daerah. Kedua definisi APBD di atas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD, Memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
 - b) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya, beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya dan beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
 - c) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
 - d) Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.
- b. Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua

aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002: 9). Adapun fungsi APBD (Memesah, 1995:18) adalah sebagai berikut:

- a) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.
- b) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- c) Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.
- d) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-batas tertentu.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Pengertian lain dari APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Siregar, 2017:31). APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Sujarweni (2015:60) dalam kutipan Lewadalu (2016:12) menyatakan APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17 dijelaskan mengenai ketentuan umum penyusunan APBD :

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
3. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
4. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

7. Efektivitas

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan outcome sedangkan hasil yang dicapai merupakan output. Efektivitas membandingkan antara outcome dengan output suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang

dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat (*spending wisely*) dalam (Mahmudi, 2018: 22).

Efektivitas memiliki manfaat dan tujuan yaitu :

1. Menghemat dan mengurangi penggunaan sumber daya.
2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga tidak terbuang percuma.
3. Meningkatkan kinerja unit kerja dalam organisasi sehingga menghasilkan output optimal.
4. Meningkatkan kualitas output kinerja.
5. Mencapai sebuah hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun Indikator dari efektivitas yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemusatan upaya.

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.
5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Pengukuran efektivitas anggaran belanja diukur lewat perbandingan realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja, yang dikemukakan oleh Mahsun (2009), yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dimana dalam efektivitas anggaran belanja, dikatakan atau dinilai efektif jika masuk dalam kriteria tingkat efektivitas atas dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang “Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan” sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- b. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- c. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- d. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

8. Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan

antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Konsep efisiensi hampir sama dengan produktivitas, suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well).

Efisiensi dapat ditingkatkan dengan empat cara sebagai berikut :

1. Menaikan output untuk input yang sama;
2. Menaikan output lebih besar dari pada proporsi peningkatan input;
3. Menurunkan input untuk output yang sama;
4. Menurunkan input lebih besar daripada proporsi penurunan output

Efisiensi memiliki beberapa beberapa tujuan dan manfaat antara lain:

- 1) Mencapai hasil atau tujuan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 2) Mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan atau usaha.
- 3) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga tidak membuang waktu, tenaga dan biaya.
- 4) Meningkatkan kinerja unit kerja dalam organisasi sehingga menghasilkan output optimal.
- 5) Meningkatkan kualitas output kinerja.

Adapun Indikator efisiensi yaitu:

- 1) Output/ outcome tunggal

Indikator ini berguna untuk menghitung efisiensi pada kasus-kasus dimana hanya ada satu output atau outcome untuk setiap pasal kebijakan atau sasaran, dan dimana semua input dapat dikaitkan pada output atau outcome yang sama.

2) Jajaran beberapa output/ outcome

Indikator ini digunakan saat kebijakan tujuan berkaitan dengan beberapa output atau outcome yang berbeda. Apabila input yang digunakan untuk menghasilkan tiap output atau outcome dapat diketahui, maka akan dapat dibentuk indikator tunggal untuk tiap output atau outcome.

Pengukuran efisiensi anggaran belanja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja yang dikemukakan oleh Mahsun (2009), yaitu:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Efisiensi anggaran belanja, dikatakan efisien apabila memenuhi kriteria efisiensi dari keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tentang “Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan”, ketentuan tingkat efisiensi dari anggaran belanja adalah sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- b. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.

- c. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- d. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

9. Belanja

Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005, belanja adalah semua pengeluaran rutin dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Belanja dikelompokkan menjadi (Widiyana, 2016). Belanja daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten maupun kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan

diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

1. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja (Widiyana, 2016):

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

2. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari (Widiyana, 2016):

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja bunga
- c. Belanja subsidi

d. Belanja hibah

e. Belanja bantuan social

Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui pembayaran pajak daerah hingga membayar retribusi daerah.

Proses belanja harus dilakukan secara terkendali oleh karena itu mekanisme belanja harus disusun seefisien dan seefektif mungkin. Auditor pemerintah lebih memperhatikan pada audit atas belanja, karena sebagian besar kebocoran APBN terjadi dalam pelaksanaan belanja. Kebocoran tersebut disebabkan karena adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maupun karena kurangnya pemahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja (Karim dkk, 2021)

B. Penelitian Terdahulu

TABEL 2. 1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Variabel Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Julita (2011)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Utara	Analisis Deskriptif	Efektivitas (X1), Efisiensi (X2), Anggaran Belanja (Y1)	Kinerja pendapatan badan lingkungan hidup provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009-2012 (BLH PROVSU) secara umum dapat dikatakan sudah baik dan kinerja belanja pada badan lingkungan hidup provinsi Sumatra utara (BLH PROVSU) dilihat dari analisis varians secara umum juga dapat dikatakan sudah baik.

2	Pangkey (2016)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.	Deskriptif kualitatif	Efektivitas (X1), Efisiensi (X2), dan Anggaran Belanja (Y)	Periode anggaran belanja 2010- 2014 untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung keseluruhannya tidak efektif karena dari setiap program dan anggaran yang direncanakan, tapi tidak sesuai anggaran yang direncanakan dan ada juga program yang tidak teralisasi. Sementara untuk tingkat efisiensi anggaran belanja tidak langsung
---	-------------------	---	--------------------------	--	---

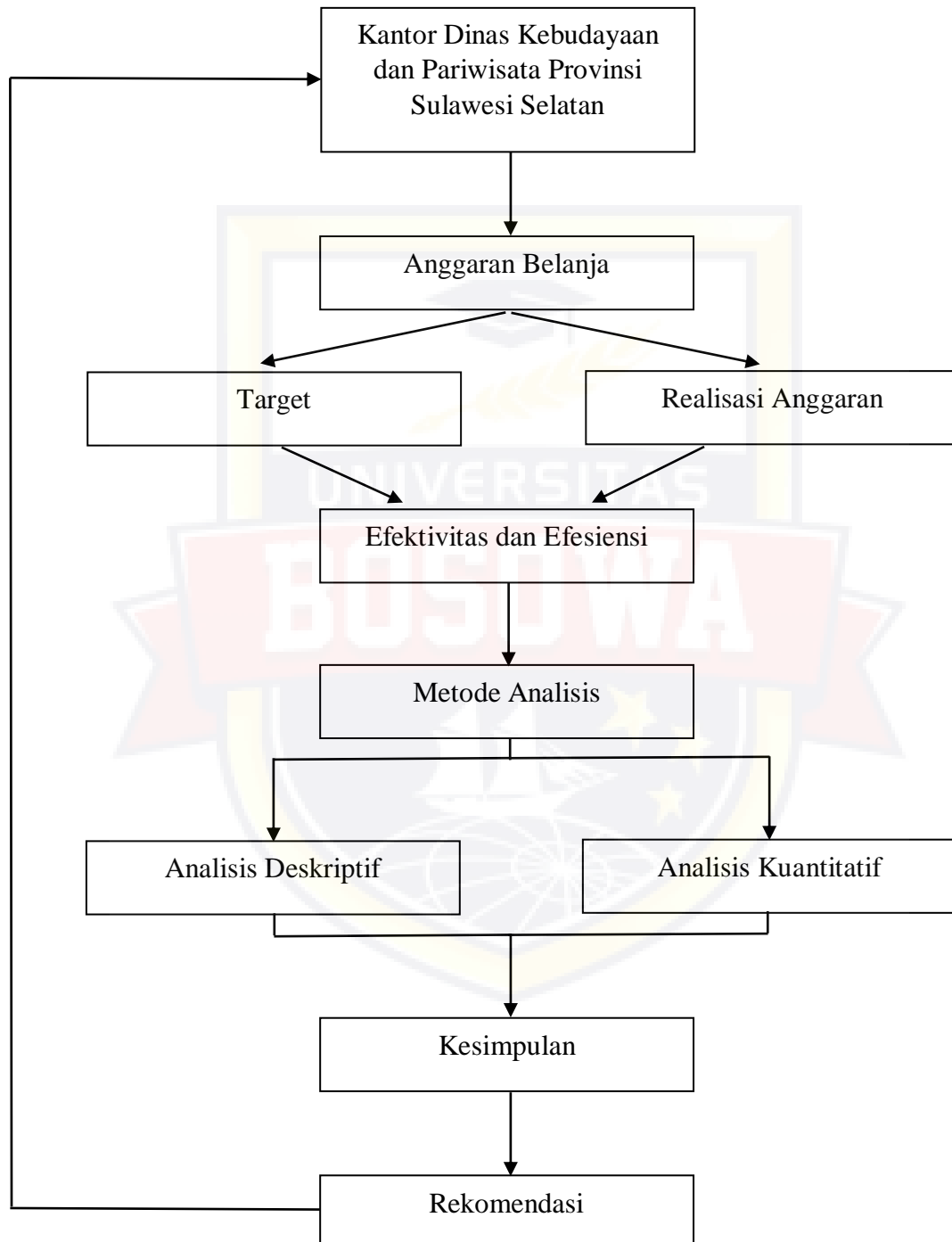
					dari periode 2010-2014 tidak efisien.
3	Fahrianta dan Carolina (2012)	Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas	Deskriptif	Efisiensi (X), dan Anggaran Belanja(Y)	Tingkat/rasio efisiensi anggaran belanja yang dicapai trennya cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dinas pendidikan Kab. Kapuas telah efisien dalam menggunakan dan mengelola anggaran belanja
4	Sumenge (2013)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	deskriptif kualitatif	Efektivitas (X1), Efisiensi (X2), dan Anggaran	Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan terendah pada

Belanja Badan	Belanja	tahun
Perencanaan	(Y)	2011.Tingkat
Pembangunan		efisiensi tahun
Daerah		2008-2011 sangat
(BAPPEDA)		efisien dan tahun
Minahasa		2012 termasuk
Selatan.		efisien.



C. Kerangka Pikir

GAMBAR 2. 1 KERANGKA PIKIR



D. Hipotesis

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka hipotesis dalam penelitian diduga bahwa:

1. Diduga efektivitas berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga efisiensi berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga efektivitas, dan efisiensi berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Kuncoro (2009:145) data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka-angka.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Jln. Jend. Sudirman No. 23 Makassar.

C. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Menurut Nanang Martono (2011:74) “Populasi merupakan keseluruhan objek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti”. Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Sampel

Menurut Nanang Martono (2011:74) “Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi”. Sampel dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Belanja yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2010), instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang terdiri dari tes, kuesioner, wawancara, dan observasi.

Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, wawancara, observasi, tes, atau dokumentasi. Instrumen penelitian yang baik harus memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, objektivitas, dan kepraktisan agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan akurat. Penggunaan instrumen penelitian yang tepat dapat membantu peneliti memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian dengan lebih akurat dan obyektif.

Intrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan pada kantor dinas kebudayaan dan kepariwisataan provinsi sulawesi selatan berupa wawancara dan dokumentasi.

E. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang terdapat pada topik penelitian "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan " adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen:

- a. Efektivitas: perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
- b. Efisiensi: hubungan antara output berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.

2. Variabel dependen:

- a. Anggaran Belanja: pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data Kualitatif

Berupa hasil wawancara, gambaran umum, tugas dan fungsi, visi dan misi, dan struktur organisasi Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Data Kuantitatif

Berupa laporan realisasi anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua data, antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang didapatkan secara langsung dari narasumber (tanpa perantara) dengan menjawab susunan pertanyaan dari peneliti melalui wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan peneliti, dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi berupa publikasi. Peneliti memperoleh data lewat catatan, dokumen, dan artikel terkait permasalahan pada objek yang diteliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi tahap penting dalam penyelesaian penelitian ini, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu dalam penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan pengumpulan data lewat:

- a. Wawancara, yaitu melakukan tatap muka dan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab pada masalah yang diteliti.
- b. Dokumentasi, dimana diperoleh lewat dokumen dan catatan-catatan yang ada, dimana data atau dokumen berupa Struktur organisasi, Visi dan Misi, dan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Studi kepustakaan (library research), dimana data yang diambil bersifat kajian teori-teori lewat buku, artikel, dan browsing lewat internet yang kemudian dijadikan landasan teoritis dan pendukung terkait permasalahan yang akan diteliti.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah melalui perhitungan tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi dari anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

- a. Perhitungan Tingkat Efektivitas

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tingkat efektivitas Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan data kuantitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan data dengan apa adanya. Menurut

Sugiyono (2016,8) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Tingkat pengukuran efektivitas menjadi salah satu tolak ukur juga terhadap pencapaian pemerintah akan seluruh sasaran yang diprogramkan dan ditargetkan terlaksanakan dengan baik atau tidak. Sehingga dapat dihitung menggunakan rumus, Mahsun (2009):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

TABEL 3. 1

KRITERIA EFEKTIVITAS

Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

b. Perhitungan Tingkat Efisiensi

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan output yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya

(dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Sehingga dapat dihitung dengan rumus seperti ini, Mahsun (2009):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

TABEL 3. 2
KRITERIA EFISIENSI

Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
>100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
<60	Sangat Efisien

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan total realisasi pendapatan yang menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah.

I. Definisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan

kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2. Anggaran

Anggaran merupakan sebuah rencana atau taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun atau lebih.

3. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah masukan yang diterima oleh organisasi dari kegiatan aktivitasnya. Bagi pemerintah seperti pendapatan melalui penerimaan atau pungutan pajak.

4. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

5. Efektivitas

Efektivitas adalah informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya informasi tersebut harus disajikan dalam waktu yang tepat.

6. Efisiensi

Efisiensi adalah suatu cara dengan bentuk usaha yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dari segi waktu, biaya dan tenaga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Kebudayaan Dan Parwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Gedung Mulo (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) dibangun oleh pemerintah colonial pada tahun 1927 dan terletak di Hospiyalweg (sekarang Jl. Jenderal Sudirman No. 23), Desa Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang Makassar.

Bangunan Mulo dimakassar, dengan arsitektur Belanda dan peninggalan colonial, masih berdiri di antara bangunan modern kota. Bagi mereka yang mengadvokasi produk dan arsitektur bergaya modern, tentunya hanya memandang sebelah mata saja, bahkan seringkali mengabaikan fungsi dan perannya, di sisi lain, mereka yang berfikir secara historis dan kultural akan selalu dibawa ke dalam suasana penasaran tentang apa momen penting dibalik bangunan ini dimasa lalu.

Gedung Mulo dibangun dengan bergaya arsitektur klasik Eropa dipadu dengan tradisional. Gedung yang awalnya digunakan sebagai sekolah lanjutan tiga tahun khusus bagi anak-anak pribumi yang orang tuanya mengabdikan kepada belanda dan dipersiapkan untuk kebutuhan pegawai pangreh praja itu kini difungsikan sebagai kantor wilayah Departemen Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan.

Secara historis, gedung berfungsi sebagai sekolah menengah khusus 3 tahun untuk anak-anak Aborigin yang orang tuanya melayani

Belanda dan mempersiapkan mereka untuk tuntutan pegawai negeri. Sekolah Mulo Makassar dibuka dengan status dan status mapan, dan lulusannya dapat melanjutkan ke pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi. Namun, masih sedikit adat di Sulawesi selatan yang dapat melanjutkan pendidikan di Muro. Hal ini karena pendidikan pada waktu itu sangat mahal. Sehingga kelompok orang tertentu diberi tempat untuk menerima pendidikan tersebut.

Fungsi dan peran gedung Mulo sebagai tumpuan pendidikan dini dimakassar menghadapi kondisi gand. Di satu sisi, bangunan tersebut seolah berfungsi sebagai “monument” menandakan bahwa ia berperan penting dalam perkembangan pendidikan.

Di sisi lain, melukiskan gambaran samar tentang pendidikan yang selama ini hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Sehingga diskriminasi seolah menjadi warisan dari kondisi tersebut. Saat ini gedung yang terawatt baik ini berfungsi sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, yang dulunya adalah Kantor wilayah Kementerian Pendidikan Nasioanl. Sebagai cakar Sejarah, bangunan Mulo dilindungi undang-undang dengan nomor registrasi 327 Suaka Margasatw a dan Peninggalan Purbakala Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

2. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

a. Visi

Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter.

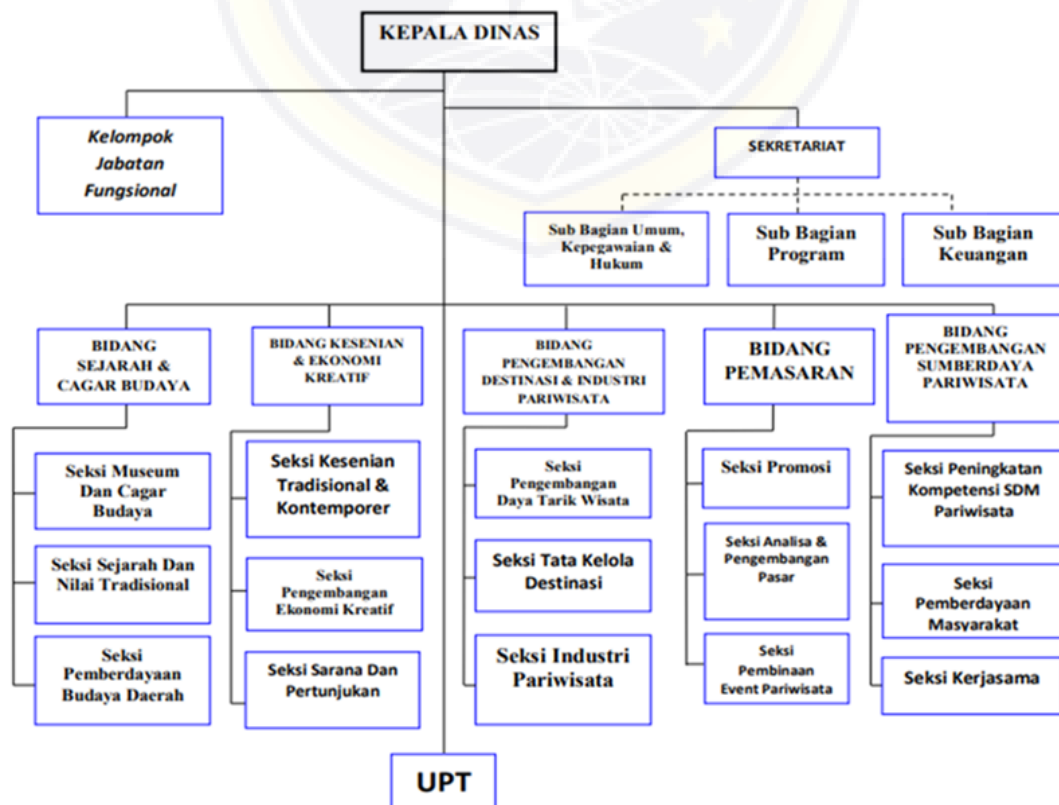
b. Misi

- i. Pemerintah yang berorientasi melayani inovatif, dan berkarakter.
- ii. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
- iii. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
- iv. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif
- v. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

3. Struktur Organisasi

GAMBAR 4. 1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI SELATAN



B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Data

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setelah diatur bahwa pendapatan pemerintah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pada konteks yang demikian, otonomi daerah dapat diandalkan sebagai konsep pembangunan dengan memberikan wewenang secara luas bagi pemerintah daerah dari pusat untuk meningkatkan PAD nya. Tuntutan peningkatan PAD semakin meningkat seiring dengan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan pada pemerintah daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen ke daerah dalam jumlah yang tidak sedikit.

Dana Perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah meskipun jumlahnya cukup memadai namun pemerintah daerah harus dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan PAD dan memberikan keleluasaan dalam membelanjakan APBD nya. Oleh karena itu, daerah diharap mampu untuk menggali potensi-potensi sumber-sumber PAD secara maksimal. Berikut ini tabel

anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022.

TABEL 4. 1
LAPORAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2020-2022

Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Persentase %
2020	41.860.449.745	35.699.517.630	85,28%
2021	50.990.553.238	43.520.457.368	85,35%
2022	40.211.960.904	38.372.882.462	95,43%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

TABEL 4. 2
LAPORAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2020-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang
2020	24.861.992.435	21.058.375.355	3.803.617.080
2021	47.412.053.238	42.242.007.785	5.170.045.453
2022	35.887.460.904	34.591.612.462	1.295.848.442

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

2. Analisis Data

a. Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan gambaran dari keberhasilan atau kemampuan publik untuk menjalankan atau merealisasikan anggaran belanja dibandingkan dengan target dan tujuan yang ditetapkan secara nyata. Sebuah organisasi apapun itu jika sudah mencapai tujuannya maka organisasi tersebut telah bisa dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Tingkat pengukuran efektivitas menjadi salah satu tolak ukur juga terhadap pencapaian pemerintah akan seluruh sasaran yang diprogramkan dan ditargetkan terlaksanakan dengan baik atau tidak.

Sehingga dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tingkat efektivitas Anggaran Belanja yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya sebagai berikut :

1) Tahun 2020

Berdasarkan target penerimaan pendapatan PAD sebesar Rp. 41.860.449.745 dengan realisasi yang diterima Rp. 35.699.517.630 maka rasio efektivitas tahun 2020 diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{35.699.517.630}{41.860.449.745} \times 100\%$$

$$= 85,28\%$$

2) Tahun 2021

Berdasarkan target penerimaan pendapatan PAD sebesar Rp. 50.990.553.238 dengan realisasi yang diterima Rp. 43.520.457.368 maka rasio efektivitas penerimaan pendapatan tahun 2021 diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{43.520.457.368}{50.990.553.238} \times 100\% \\ &= 85,35\% \end{aligned}$$

3) Tahun 2022

Berdasarkan target penerimaan pendapatan PAD sebesar Rp. 40.211.960.904 dengan realisasi yang diterima Rp. 38.372.882.462 maka rasio efektivitas penerimaan pendapatan tahun 2022 diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{38.372.882.462}{40.211.960.904} \times 100\% \\ &= 95,43\% \end{aligned}$$

TABEL 4. 3

**TINGKAT EFEKTIVITAS ANGGARAN BELANJA DAERAH DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. SULSEL TAHUN 2020-2022**

Tahun	Efektivitas	Kriteria
2020	85,28%	Cukup Efektif
2021	85,35%	Cukup Efektif
2022	95.43%	Efektif

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tingkat efektifitas anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai kriteria efektif dan cukup efektif. Secara keseluruhan, tingkat efektifitas anggaran belanja yang tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 95.43% dengan kriteria efektif dibandingkan Tingkat efektifitas anggaran belanja pada tahun 2020 sebesar 85.28% dan tahun 2021 sebesar 85,35% dengan kriteria cukup efektif. Dengan hasil perhitungan dari tahun ketahun kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan anggaran belanja berhasil menunjukkan hasil kinerja yang telah sesuai dengan yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan kriteria efektif dan cukup efektif.

b. Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan pemanfaatan sumber daya atau input secara keseluruhan yang nantinya akan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan dari sebuah kegiatan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan dengan seminimal mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan output yang seoptimal mungkin.

Perhitungan tingkat efisiensi dari anggaran belanja dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Sehingga dapat dihitung dengan rumus seperti ini:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat digunakan untuk menganalisis tingkat efisiensi Anggaran Belanja yang dilakukan oleh Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya berikut :

1) Tahun 2020

Berdasarkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 35.699.517.630 dengan realisasi anggaran belanja langsung Rp. 21.058.375.355 maka rasio efisiensi tahun 2020 diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{21.058.375.355}{35.699.517.630} \times 100\% \\ &= 58,99\% \end{aligned}$$

2) Tahun 2021

Berdasarkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 43.520.457.368 dengan realisasi anggaran belanja langsung Rp. 42.242.007.785 maka rasio efisiensi tahun 2021 diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{42.242.007.785}{43.520.457.368} \times 100\% \\ &= 97,06\% \end{aligned}$$

3) Tahun 2022

Berdasarkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 38.372.882.462 dengan realisasi anggaran belanja langsung Rp.

34.591.612.462 maka rasio efisiensi tahun 2022 diketahui dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{34.591.612.462}{38.372.882.462} \times 100\% \\ &= 90,14\% \end{aligned}$$

TABEL 4. 4
TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BELANJA DAERAH DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. SULSEL TAHUN 2020-2022

Tahun	Efisiensi	Kriteria
2020	58,99%	Sangat Efisien
2021	97,06%	Kurang Efisien
2022	90,14%	Kurang Efisien

Sumber : Data diolah,2023

Berdasarkan tingkat efisiensi anggaran belanja daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 memiliki persentase sebesar 58,99% yang menunjukkan kriteria sangat efisien. Sedangkan pada tahun 2021, menunjukkan tingkat efisiensi anggaran belanja daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 97,06% yang menunjukkan kriteria kurang efisien, dan tingkat efisiensi anggaran belanja daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 memiliki persentase sebesar 90,14% yang menunjukkan kriteria kurang efisien. Dalam hal ini menjelaskan bahwa kinerja dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan masih belum dikatakan efisien dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 memiliki tingkat persentase melebihi 90% yang masih dalam kategori kurang

efisien. Hal ini berarti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan harus mengoptimalkan keuangan daerah secara lebih maksimal lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Anggaran Belanja Daerah Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan", serta menggunakan variabel Efektivitas, Efisiensi, dan Anggaran Belanja dengan jenis penelitian deskriptif dan metode kuantitatif, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Efektivitas Anggaran Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 efektivitas anggaran belanja daerah dianggap cukup efektif begitu juga dengan pada Tahun 2021 efektivitas anggaran belanja daerah dianggap cukup efektif dan pada tahun 2022 efektivitas anggaran belanja daerah dianggap efektif
2. Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 efisiensi anggaran belanja daerah dianggap sangat efisien dan pada tahun 2021 efisiensi anggaran belanja daerah dianggap kurang efisien dan pada tahun 2022 efisiensi anggaran belanja daerah dianggap "kurang efisien".
3. Dari kesimpulan di atas, terlihat bahwa pada tahun 2022, tingkat efektivitas anggaran meningkat menjadi "efektif" dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, tingkat efisiensi anggaran mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 setelah mencapai puncaknya pada tahun 2020.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Disarankan agar Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan lebih meningkatkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun swasta serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan maupun anggaran agar terciptanya keterpaduan, integritas, dan transparansi dalam rangka mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan yang berbudaya dan menjadikan Sulawesi Selatan menjadi salah satu destinasi pariwisata berdaya saing.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau masukan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan agar meningkatkan pengawasan kepada pegawai mengenai anggaran belanja yang dikeluarkan agar supaya pengeluarannya bisa teratur sesuai anggaran belanja yang dilakukan setiap tahun periode berjalan.
3. Peneliti menyarankan agar pada priode-periode berikutnya untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan agar supaya realisasi anggarannya optimal dan meningkatkan kinerja keuangannya sehingga bisa mempertahankan kriteria efektif dan pengelolaan anggaran belanja yang cermat, memilih input serta cermat dalam pengelolaannya untuk dapat menghasilkan output yang sebesar-besarnya dan mempertahankan kriteria sangat efisien yang telah dicapai.


DAFTAR PUSTAKA

- Christover Lantu, Linda Lambey, & Anneke Wangkar. (2017, Juni). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Vol.5 no.2 Juni 2017, Hal. 1260-1270.
- Dindayani, N. (2020). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Dalam Menunjang Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Pengendalian Intern Pada PT Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall Ratu Indah. *Economics Bosowa*, 5(003), 172-185.
- Dwi Nofita Sari, Sri Mintarti, & Salmah Pattisahusiwa. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. *KINERJA 15 (1)*, 38-43.
- Erika Z. Lasupu, Lintje Kalangi, & Lidia M. Mawikere. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal EMBA*, Vol.9 No.3 Juli 2021, Hal 1433-1441.
- Federicky Manimbaga, Jullie J. Sondakh, & Sherly Pinatik. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA*, Vol.9 No.2 April 2021, Hal. 982-992.
- Harry P.Paat, Grace B. Nangoi, & Rudy J. Pusung. (2019). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, Vol.7 No.3 Juli 2019, Hal 2979-2988.
- Immanuel Pangkey & Sherly Pinatik. (2015). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI UTARA. *jurnal EMBA*, Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal 33-43.
- Joko, E. A., Mane, A. A., & Abubakar, H. (2022). Efektivitas PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR dalam Peningkatan Pajak Daerah.
- Julita Se, M. (2011). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Vol.10 No.2 (2011).
- Mahmudi, M. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Dalam Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta (3rd Ed., Vol. 1). Yogyakarta: UPP STIM YKPIN.

- Mane, A. A., & Setiawan, L. ANALISIS EFESIENSI BIAYA DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA PT ESA PUTLI PERKASA UTAMA BARRU.
- Nur, I. FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (Pada kantor BKUD Kab. Pinrang).
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, Vol.1 N0.3 September 2013, Hal. 74-81.
- Sunanto. (2017). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Monex*, Vol.6 No.1 Januari 2017, Hal 210-217.
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 170-177.
- Tamasoleng, A. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol.3 No.1, 2015: 97-110.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Penelitian

 **UNIVERSITAS BOSOWA**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568
<http://www.universitatosowa.ac.id>

Nomor : A.090/FEB/UNIBOS/V/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Melakukan Pengambilan Data

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan**
Di, -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :


Nama : Putra Raihan Bimawardana
NIM : 4519012097
Program Studi : Manajemen
No. Tlp/HP : 0895339010990

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 23 Mei 2023
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM
NIDN. 09 2 412 680

Tembusan
1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 17695/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulsel
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR Nomor : A.0880/FEB/UNIBOS/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: PUTRA RAIHAN BIMAWARDANA
Nomor Pokok	: 4519012097
Program Studi	: Manajemen
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **29 Mei s/d 30 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 26 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
LAPORAN RINCIAN REALISASI ANGGARAN**

SKPD : Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata
Pengguna Anggaran : Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
Bendahara Pengeluaran : MARZUKI, S.Pd
Tahun Anggaran : 2020
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	734.000.000,00	60.200.000,00	(673.800.000,00)	8,20
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	734.000.000,00	60.200.000,00	(673.800.000,00)	8,20
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	534.000.000,00	60.200.000,00	(473.800.000,00)	11,27
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	534.000.000,00	60.200.000,00	(473.800.000,00)	11,27
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	214.000.000,00	28.300.000,00	(185.700.000,00)	13,22
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	320.000.000,00	31.900.000,00	(288.100.000,00)	9,97
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
4.1.4.11.02	Fasilitas Umum	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
4.1.4.16	Sewa Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.16.01	Sewa Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	41.126.449.745,33	35.639.317.630,00	(5.487.132.115,33)	86,66
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.264.457.310,33	14.580.942.275,00	(1.683.515.035,33)	89,65
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	16.264.457.310,33	14.580.942.275,00	(1.683.515.035,33)	89,65
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	8.431.272.589,33	8.191.573.699,00	(239.698.890,33)	97,16
5.1.1.01.01	Gaji Pokok/Uang Representasi 1)	6.844.942.527,52	6.667.180.840,00	(177.761.687,52)	97,40
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	580.646.454,30	572.796.249,00	(7.850.205,30)	98,65
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	357.234.250,00	322.820.000,00	(34.414.250,00)	90,37
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	65.610.625,00	61.205.000,00	(4.405.625,00)	93,29
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	249.649.250,00	243.960.000,00	(5.689.250,00)	97,72
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	307.547.824,50	298.877.340,00	(8.670.484,50)	97,18
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.549.260,79	24.652.743,00	(896.517,79)	96,49
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	92.397,22	81.527,00	(10.870,22)	88,24
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	7.833.184.721,00	6.389.368.576,00	(1.443.816.145,00)	81,57
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	7.833.184.721,00	6.389.368.576,00	(1.443.816.145,00)	81,57
5.2	BELANJA LANGSUNG	24.861.992.435,00	21.058.375.355,00	(3.803.617.080,00)	84,70
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.500.000,00	22.417.000,00	(83.000,00)	99,63
5.2.1.03	Uang Lembur	22.500.000,00	22.417.000,00	(83.000,00)	99,63
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.500.000,00	22.417.000,00	(83.000,00)	99,63
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.703.782.835,00	17.527.725.355,00	(3.176.057.480,00)	84,66
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.858.398.920,00	1.377.631.220,00	(480.767.700,00)	74,13
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	360.366.500,00	356.733.400,00	(3.633.100,00)	98,99
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00	100,00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	53.900.500,00	47.950.500,00	(5.950.000,00)	88,96
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	181.845.000,00	181.608.000,00	(237.000,00)	99,87
5.2.2.01.11	Belanja pembelian piala	24.149.520,00	15.149.520,00	(9.000.000,00)	62,73
5.2.2.01.12	Belanja souvenir dan cinderamata	1.231.992.400,00	770.044.800,00	(461.947.600,00)	62,50
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	321.952.500,00	320.396.500,00	(1.556.000,00)	99,52
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	300.000.000,00	298.474.000,00	(1.526.000,00)	99,49
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	19.380.000,00	19.350.000,00	(30.000,00)	99,85

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Laboratorium	2.572.500,00	2.572.500,00	0,00	100,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.507.518.200,00	4.959.422.889,00	(548.095.311,00)	90,05
5.2.2.03.01	Belanja telepon	27.000.000,00	19.047.272,00	(7.952.728,00)	70,55
5.2.2.03.02	Belanja air	3.600.000,00	249.945,00	(3.350.055,00)	6,94
5.2.2.03.03	Belanja listrik	534.000.000,00	436.497.410,00	(97.502.590,00)	81,74
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	216.700.000,00	209.796.552,00	(6.903.448,00)	96,81
5.2.2.03.12	Belanja jasa transportasi	60.900.000,00	55.206.700,00	(5.693.300,00)	90,65
5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi	396.154.500,00	329.051.500,00	(67.103.000,00)	83,06
5.2.2.03.15	Belanja Dekorasi	347.371.600,00	345.409.400,00	(1.962.200,00)	99,44
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Kebersihan	593.619.200,00	593.619.200,00	0,00	100,00
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	2.018.649.400,00	1.780.009.856,00	(238.639.544,00)	88,18
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS)	599.950.000,00	569.950.000,00	(30.000.000,00)	95,00
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Sopir	50.261.900,00	50.020.054,00	(241.846,00)	99,52
5.2.2.03.26	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.29	Belanja Publikasi	659.311.600,00	570.565.000,00	(88.746.600,00)	86,54
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.670.000,00	154.790.546,00	(11.879.454,00)	92,87
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	146.670.000,00	135.508.981,00	(11.161.019,00)	92,39
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	19.281.565,00	(718.435,00)	96,41
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.853.323.150,00	1.664.285.200,00	(189.037.950,00)	89,80
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.679.037.850,00	1.494.195.400,00	(184.842.450,00)	88,99
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	174.285.300,00	170.089.800,00	(4.195.500,00)	97,59
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	183.894.000,00	180.570.000,00	(3.324.000,00)	98,19
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	183.894.000,00	180.570.000,00	(3.324.000,00)	98,19
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	94.026.000,00	89.776.000,00	(4.250.000,00)	95,48
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	94.026.000,00	89.776.000,00	(4.250.000,00)	95,48
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	301.729.400,00	289.732.500,00	(11.996.900,00)	96,02
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	19.840.000,00	15.450.000,00	(4.390.000,00)	77,87
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	140.549.400,00	137.167.500,00	(3.381.900,00)	97,59
5.2.2.10.09	Belanja sewa panggung/stage	22.840.000,00	19.115.000,00	(3.725.000,00)	83,69
5.2.2.10.10	Belanja sewa lighting/penerangan	35.000.000,00	34.500.000,00	(500.000,00)	98,57
5.2.2.10.12	Belanja sewa multimedia	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.573.890.000,00	961.530.740,00	(612.359.260,00)	61,09
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.546.242.000,00	933.908.550,00	(612.333.450,00)	60,40
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	27.648.000,00	27.622.190,00	(25.810,00)	99,91
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.088.221.685,00	2.975.336.760,00	(112.884.925,00)	96,34
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.703.037.137,00	1.643.666.121,00	(59.371.016,00)	96,51
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.385.184.548,00	1.331.670.639,00	(53.513.909,00)	96,14
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.214.880.000,00	1.210.261.700,00	(4.618.300,00)	99,62
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung tempat kerja	406.000.000,00	404.221.000,00	(1.779.000,00)	99,56
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	754.680.000,00	752.190.700,00	(2.489.300,00)	99,67
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	39.000.000,00	38.945.000,00	(55.000,00)	99,86
5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Komputer	10.000.000,00	9.905.000,00	(95.000,00)	99,05

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.20.44	Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet /Aplikasi online	5.200.000,00	5.000.000,00	(200.000,00)	96,15
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	2.727.018.500,00	1.872.801.300,00	(854.217.200,00)	68,68
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	1.240.594.500,00	1.207.467.700,00	(33.126.800,00)	97,33
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	161.028.325,00	83.777.000,00	(77.251.325,00)	52,03
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	116.325.675,00	64.450.000,00	(51.875.675,00)	55,40
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultasi Kajian	742.820.000,00	256.656.000,00	(486.164.000,00)	34,55
5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultasi IT	466.250.000,00	260.450.600,00	(205.799.400,00)	55,86
5.2.2.22	Belanja Barang yang Akan di Serahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	1.464.040.480,00	1.123.270.000,00	(340.770.480,00)	76,72
5.2.2.22.01	Belanja Barang Yang akan di Serahkan ke Masyarakat	1.464.040.480,00	1.123.270.000,00	(340.770.480,00)	76,72
5.2.2.25	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	148.220.000,00	148.220.000,00	0,00	100,00
5.2.2.25.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	148.220.000,00	148.220.000,00	0,00	100,00
5.2.3	BELANJA MODAL	4.135.709.600,00	3.508.233.000,00	(627.476.600,00)	84,83
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	209.518.000,00	206.249.800,00	(3.268.200,00)	98,44
5.2.3.10.10	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	200.000.000,00	196.750.000,00	(3.250.000,00)	98,38
5.2.3.10.18	Belanja modal pengadaan mesin absensi	9.518.000,00	9.499.800,00	(18.200,00)	99,81
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	422.441.600,00	261.050.000,00	(161.391.600,00)	61,80
5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	422.441.600,00	261.050.000,00	(161.391.600,00)	61,80
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.24.02	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.799.800.000,00	2.339.433.200,00	(460.366.800,00)	83,56
5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1.927.000.000,00	1.742.433.200,00	(184.566.800,00)	90,42
5.2.3.26.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	400.000.000,00	199.000.000,00	(201.000.000,00)	49,75
5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.26.15	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pertamanan	472.800.000,00	398.000.000,00	(74.800.000,00)	84,18
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.28.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.31	Belanja Aset Lainnya	600.000.000,00	598.500.000,00	(1.500.000,00)	99,75
5.2.3.31.01	Belanja modal aset tak berwujud	600.000.000,00	598.500.000,00	(1.500.000,00)	99,75
5.2.3.32	Belanja Modal Pengadaan/Pembelian Konstruksi/Bangunan/Alat-alat informasi	103.950.000,00	103.000.000,00	(950.000,00)	99,09
5.2.3.32.03	Belanja modal pengadaan papan reklame/informasi	103.950.000,00	103.000.000,00	(950.000,00)	99,09

Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN RINCIAN REALISASI ANGGARAN

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
Pengguna Anggaran : Prof. Dr. MUHAMMAD JUFRI, M.Si.,M.Psi, Psikoloq
Bendahara Pengeluaran : MIAN PARINDING, S.Sos
Tahun Anggaran : 2021
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	734.000.000,00	66.500.000,00	(667.500.000,00)	9,06
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	734.000.000,00	66.500.000,00	(667.500.000,00)	9,06
4.1.02	Retribusi Daerah	534.000.000,00	66.500.000,00	(467.500.000,00)	12,45
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	534.000.000,00	66.500.000,00	(467.500.000,00)	12,45
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	214.000.000,00	56.900.000,00	(157.100.000,00)	26,59
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	160.000.000,00	56.900.000,00	(103.100.000,00)	35,56
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	320.000.000,00	9.600.000,00	(310.400.000,00)	3,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	320.000.000,00	9.600.000,00	(310.400.000,00)	3,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
5	BELANJA DAERAH	50.256.553.238,00	43.453.957.368,00	(6.802.595.870,00)	86,46
5.1	BELANJA OPERASI	44.723.724.864,00	38.435.723.086,00	(6.288.001.778,00)	85,94
5.1.01	Belanja Pegawai	15.156.538.609,00	14.602.700.275,00	(553.838.334,00)	96,35
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.486.678.983,00	8.044.774.304,00	(441.904.679,00)	94,79
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	6.793.766.315,00	6.468.744.932,00	(325.021.383,00)	95,22
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.793.766.315,00	6.468.744.932,00	(325.021.383,00)	95,22
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	586.597.597,00	540.638.328,00	(45.959.269,00)	92,17
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	586.597.597,00	540.638.328,00	(45.959.269,00)	92,17
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	401.298.500,00	392.660.000,00	(8.638.500,00)	97,85
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	401.298.500,00	392.660.000,00	(8.638.500,00)	97,85
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	78.886.250,00	73.650.000,00	(5.236.250,00)	93,36
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	78.886.250,00	73.650.000,00	(5.236.250,00)	93,36
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	219.052.500,00	207.840.000,00	(11.212.500,00)	94,88
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	219.052.500,00	207.840.000,00	(11.212.500,00)	94,88
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	351.475.986,00	331.756.020,00	(19.719.966,00)	94,39
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	351.475.986,00	331.756.020,00	(19.719.966,00)	94,39
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	55.510.699,00	29.398.533,00	(26.112.166,00)	52,96
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	55.510.699,00	29.398.533,00	(26.112.166,00)	52,96
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	91.136,00	86.491,00	(4.645,00)	94,90
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	91.136,00	86.491,00	(4.645,00)	94,90
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.669.859.626,00	6.557.925.971,00	(111.933.655,00)	98,32
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.669.859.626,00	6.557.925.971,00	(111.933.655,00)	98,32
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.669.859.626,00	6.557.925.971,00	(111.933.655,00)	98,32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.722.686.255,00	22.621.073.228,00	(4.101.613.027,00)	84,65
5.1.02.01	Belanja Barang	9.039.760.020,00	7.773.211.781,00	(1.266.548.239,00)	85,99
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.033.866.020,00	7.770.917.781,00	(1.262.948.239,00)	86,02
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	188.729.200,00	188.000.000,00	(729.200,00)	99,61
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	163.400.000,00	161.920.000,00	(1.480.000,00)	99,09
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.086.442.500,00	723.285.100,00	(363.157.400,00)	66,57
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.485.540.120,00	1.247.556.480,00	(237.983.640,00)	83,98
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.904.385.700,00	1.737.809.300,00	(166.576.400,00)	91,25
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	581.000,00	575.000,00	(6.000,00)	98,97
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.742.500,00	7.742.500,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	582.750.000,00	569.192.500,00	(13.557.500,00)	97,67
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	81.902.000,00	75.901.999,00	(6.000.001,00)	92,67
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	20.000.000,00	19.940.000,00	(60.000,00)	99,70
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	400.805.000,00	264.420.200,00	(136.384.800,00)	65,97
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.922.932.000,00	2.620.676.000,00	(302.256.000,00)	89,66
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	67.896.000,00	66.038.702,00	(1.857.298,00)	97,26
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	46.200.000,00	13.300.000,00	(32.900.000,00)	28,79
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.894.000,00	2.294.000,00	(3.600.000,00)	38,92
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	4.824.000,00	1.224.000,00	(3.600.000,00)	25,37
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.319.717.573,00	11.730.888.614,00	(1.588.828.959,00)	88,07
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.223.622.173,00	8.809.405.614,00	(1.414.216.559,00)	86,17
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	538.350.000,00	387.200.000,00	(151.150.000,00)	71,92
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	156.250.000,00	0,00	(156.250.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	523.000.000,00	500.639.500,00	(22.360.500,00)	95,72
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	835.791.264,00	603.290.177,00	(232.501.087,00)	72,18
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	183.280.000,00	178.400.000,00	(4.880.000,00)	97,34
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.915.354.980,00	1.838.087.549,00	(77.267.431,00)	95,97
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	75.981.024,00	50.554.115,00	(25.426.909,00)	66,54
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	85.000.000,00	83.900.000,00	(1.100.000,00)	98,71
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.576.149.000,00	1.558.579.000,00	(17.570.000,00)	98,89
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	400.000.000,00	397.514.000,00	(2.486.000,00)	99,38
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.833.979.000,00	2.476.772.800,00	(357.206.200,00)	87,40
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	18.000.000,00	5.901.440,00	(12.098.560,00)	32,79
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.014.000,00	0,00	(4.014.000,00)	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	711.053.905,00	429.122.296,00	(281.931.609,00)	60,35
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	224.219.000,00	173.600.234,00	(50.618.766,00)	77,42
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.000.000,00	14.644.503,00	(15.355.497,00)	48,82
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	653.768.000,00	505.022.000,00	(148.746.000,00)	77,25

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	224.250.000,00	195.770.000,00	(28.480.000,00)	87,30
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	209.586.000,00	117.830.000,00	(91.756.000,00)	56,22
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	28.600.000,00	28.200.000,00	(400.000,00)	98,60
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.000.000,00	10.000.000,00	(16.000.000,00)	38,46
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	48.882.000,00	48.882.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	102.000.000,00	89.890.000,00	(12.110.000,00)	88,13
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	55.500.000,00	53.000.000,00	(2.500.000,00)	95,50
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	55.500.000,00	53.000.000,00	(2.500.000,00)	95,50
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	256.800.000,00	238.600.000,00	(18.200.000,00)	92,91
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	214.800.000,00	197.200.000,00	(17.600.000,00)	91,81
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	42.000.000,00	41.400.000,00	(600.000,00)	98,57
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	194.473.400,00	192.139.000,00	(2.334.400,00)	98,80
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	115.700.000,00	114.985.000,00	(715.000,00)	99,38
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	78.773.400,00	77.154.000,00	(1.619.400,00)	97,94
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.785.554.000,00	1.782.952.000,00	(2.602.000,00)	99,85
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	446.164.000,00	444.939.000,00	(1.225.000,00)	99,73
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000,00	99.033.000,00	(967.000,00)	99,03
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	339.390.000,00	339.390.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataaan	900.000.000,00	899.590.000,00	(410.000,00)	99,95
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000,00	149.770.000,00	(230.000,00)	99,85
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000,00	149.770.000,00	(230.000,00)	99,85
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.371.189.662,00	1.125.595.669,00	(245.593.993,00)	82,09
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	265.960.662,00	189.380.669,00	(76.579.993,00)	71,21
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	209.560.662,00	140.827.669,00	(68.732.993,00)	67,20
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	22.150.000,00	20.075.000,00	(2.075.000,00)	90,63
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	12.500.000,00	12.478.000,00	(22.000,00)	99,82
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.105.229.000,00	936.215.000,00	(169.014.000,00)	84,71
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.000.000,00	(1.000.000,00)	99,50
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	905.229.000,00	737.215.000,00	(168.014.000,00)	81,44

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	2.702.019.000,00	1.701.497.164,00	(1.000.521.836,00)	62,97
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.702.019.000,00	1.701.497.164,00	(1.000.521.836,00)	62,97
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.596.862.000,00	1.658.297.164,00	(938.564.836,00)	63,86
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61.957.000,00	0,00	(61.957.000,00)	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	290.000.000,00	289.880.000,00	(120.000,00)	99,96
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	290.000.000,00	289.880.000,00	(120.000,00)	99,96
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	290.000.000,00	289.880.000,00	(120.000,00)	99,96
5.1.05	Belanja Hibah	2.844.500.000,00	1.211.949.583,00	(1.632.550.417,00)	42,61
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.844.500.000,00	1.211.949.583,00	(1.632.550.417,00)	42,61
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.844.500.000,00	1.211.949.583,00	(1.632.550.417,00)	42,61
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.844.500.000,00	1.211.949.583,00	(1.632.550.417,00)	42,61
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	5.532.828.374,00	5.018.234.282,00	(514.594.092,00)	90,70
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	998.646.500,00	911.311.414,00	(87.335.086,00)	91,25
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	394.581.000,00	308.501.414,00	(86.079.586,00)	78,18
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	263.966.000,00	185.261.414,00	(78.704.586,00)	70,18
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	263.966.000,00	185.261.414,00	(78.704.586,00)	70,18
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	130.615.000,00	123.240.000,00	(7.375.000,00)	94,35
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	120.000.000,00	119.240.000,00	(760.000,00)	99,37
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.615.000,00	4.000.000,00	(6.615.000,00)	37,68
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	440.715.500,00	439.460.000,00	(1.255.500,00)	99,72

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	423.000.000,00	421.900.000,00	(1.100.000,00)	99,74
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	423.000.000,00	421.900.000,00	(1.100.000,00)	99,74
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.715.500,00	17.560.000,00	(155.500,00)	99,12
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	17.715.500,00	17.560.000,00	(155.500,00)	99,12
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	159.600.000,00	159.600.000,00	0,00	100,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	159.600.000,00	159.600.000,00	0,00	100,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	159.600.000,00	159.600.000,00	0,00	100,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.738.136.258,00	3.510.877.254,00	(227.259.004,00)	93,92
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.738.136.258,00	3.510.877.254,00	(227.259.004,00)	93,92
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.438.136.258,00	3.216.963.254,00	(221.173.004,00)	93,57
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.195.454.372,00	1.985.408.369,00	(210.046.003,00)	90,43
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	443.381.886,00	443.381.885,00	(1,00)	100,00
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	199.300.000,00	199.300.000,00	0,00	100,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	600.000.000,00	588.873.000,00	(11.127.000,00)	98,15
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	300.000.000,00	293.914.000,00	(6.086.000,00)	97,97
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	300.000.000,00	293.914.000,00	(6.086.000,00)	97,97
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	796.045.616,00	596.045.614,00	(200.000.002,00)	74,88
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	596.045.616,00	596.045.614,00	(2,00)	100,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	596.045.616,00	596.045.614,00	(2,00)	100,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	596.045.616,00	596.045.614,00	(2,00)	100,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN LAPORAN RINCIAN REALISASI ANGGARAN

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
Pengguna Anggaran : Prof. Dr. MUHAMMAD JUFRI, M.Si., M.Psi, Psikoloq
Bendahara Pengeluaran : MIAN PARINDING, S.Sos
Tahun Anggaran : 2022
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	287.500.000,00	301.770.000,00	-14.270.000,00	104,96
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	287.500.000,00	301.770.000,00	-14.270.000,00	104,96
4.1.02	Retribusi Daerah	287.500.000,00	301.770.000,00	-14.270.000,00	104,96
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	287.500.000,00	301.770.000,00	-14.270.000,00	104,96
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	116.500.000,00	124.070.000,00	-7.570.000,00	106,50
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	116.500.000,00	124.070.000,00	-7.570.000,00	106,50
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	171.000.000,00	177.700.000,00	-6.700.000,00	103,92
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	171.000.000,00	177.700.000,00	-6.700.000,00	103,92
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	39.924.460.904,00	38.071.112.462,00	(1.853.348.442,00)	95,36
5.1	BELANJA OPERASI	38.266.893.904,00	36.765.011.902,00	(1.501.882.002,00)	96,08
5.1.01	Belanja Pegawai	12.808.988.472,00	12.523.704.899,00	(285.283.573,00)	97,77
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.842.877.599,00	7.695.182.964,00	(147.694.635,00)	98,12
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	6.044.801.592,00	5.924.114.129,00	(120.687.463,00)	98,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.044.801.592,00	5.924.114.129,00	(120.687.463,00)	98,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	524.199.240,00	519.395.430,00	(4.803.810,00)	99,08
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	524.199.240,00	519.395.430,00	(4.803.810,00)	99,08
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	389.266.150,00	377.219.900,00	(12.046.250,00)	96,91
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	389.266.150,00	377.219.900,00	(12.046.250,00)	96,91
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	47.671.875,00	47.250.000,00	(421.875,00)	99,12
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	47.671.875,00	47.250.000,00	(421.875,00)	99,12
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	191.592.500,00	190.490.000,00	(1.102.500,00)	99,42
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	191.592.500,00	190.490.000,00	(1.102.500,00)	99,42
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	316.303.403,00	312.781.980,00	(3.521.423,00)	98,89
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	316.303.403,00	312.781.980,00	(3.521.423,00)	98,89
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	34.074.012,00	33.614.588,00	(459.424,00)	98,65
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	34.074.012,00	33.614.588,00	(459.424,00)	98,65
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	78.970,00	78.821,00	(149,00)	99,81
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	78.970,00	78.821,00	(149,00)	99,81
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	245.479.561,00	241.585.931,00	(3.893.630,00)	98,41
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	245.479.561,00	241.585.931,00	(3.893.630,00)	98,41
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.352.557,00	12.163.011,00	(189.546,00)	98,47
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.352.557,00	12.163.011,00	(189.546,00)	98,47
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	37.057.739,00	36.489.174,00	(568.565,00)	98,47
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	37.057.739,00	36.489.174,00	(568.565,00)	98,47
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.966.110.873,00	4.828.521.935,00	(137.588.938,00)	97,23
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.966.110.873,00	4.828.521.935,00	(137.588.938,00)	97,23

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.966.110.873,00	4.828.521.935,00	(137.588.938,00)	97,23
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.420.905.432,00	20.761.807.003,00	(659.098.429,00)	96,92
5.1.02.01	Belanja Barang	6.143.053.815,00	6.002.489.766,00	(140.564.049,00)	97,71
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.141.798.815,00	6.001.234.766,00	(140.564.049,00)	97,71
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	279.710.200,00	277.872.900,00	(1.837.300,00)	99,34
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	210.610.200,00	206.864.500,00	(3.745.700,00)	98,22
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	289.458.600,00	285.619.982,00	(3.838.618,00)	98,67
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	6.000.000,00	5.727.600,00	(272.400,00)	95,46
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	826.668.400,00	801.975.599,00	(24.692.801,00)	97,01
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.692.722.915,00	1.671.194.898,00	(21.528.017,00)	98,73
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	492.000,00	300.000,00	(192.000,00)	60,98
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.096.000,00	28.392.309,00	(703.691,00)	97,58
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	29.141.000,00	28.939.860,00	(201.140,00)	99,31
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	25.445.500,00	25.188.964,00	(256.536,00)	98,99
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	453.676.000,00	449.399.600,00	(4.276.400,00)	99,06
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Lainnya	39.730.000,00	38.440.000,00	(1.290.000,00)	96,75
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	23.000.000,00	22.977.000,00	(23.000,00)	99,90
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	118.700.000,00	117.630.575,00	(1.069.425,00)	99,10
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.585.757.000,00	1.516.756.393,00	(69.000.607,00)	95,65
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	238.952.000,00	232.797.792,00	(6.154.208,00)	97,42
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	91.824.000,00	91.392.000,00	(432.000,00)	99,53
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	93.500.000,00	93.010.230,00	(489.770,00)	99,48
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	104.115.000,00	103.554.564,00	(560.436,00)	99,46
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	100,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.748.177.632,00	11.457.440.343,00	(290.737.289,00)	97,53
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.633.157.120,00	9.437.486.678,00	(195.670.442,00)	97,97
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	251.350.000,00	247.250.000,00	(4.100.000,00)	98,37
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	651.800.000,00	651.800.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	435.497.628,00	427.097.628,00	(8.400.000,00)	98,07
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	253.315.876,00	244.265.876,00	(9.050.000,00)	96,43
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.975.506.624,00	1.943.847.864,00	(31.658.760,00)	98,40
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	37.990.512,00	37.990.512,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	52.050.000,00	52.050.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	333.475.000,00	330.447.000,00	(3.028.000,00)	99,09
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.372.000.000,00	2.353.824.020,00	(18.175.980,00)	99,23
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	200.000.000,00	199.000.000,00	(1.000.000,00)	99,50
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.231.050.000,00	2.206.356.500,00	(24.693.500,00)	98,89
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	561.039.480,00	513.345.111,00	(47.694.369,00)	91,50
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.760.000,00	1.200.000,00	(4.560.000,00)	20,83
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	232.722.000,00	202.883.332,00	(29.838.668,00)	87,18
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.000.000,00	16.528.835,00	(13.471.165,00)	55,10
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	110.422.512,00	68.264.010,00	(42.158.502,00)	61,82
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	100.832.112,00	65.240.010,00	(35.592.102,00)	64,70
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.262.400,00	3.024.000,00	(1.238.400,00)	70,95
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.328.000,00	0,00	(5.328.000,00)	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	646.648.000,00	636.842.515,00	(9.805.485,00)	98,48
5.1.02.02.04.0030	Belanja Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan	3.750.000,00	3.746.250,00	(3.750,00)	99,90
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	257.400.000,00	253.935.700,00	(3.464.300,00)	98,65
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.248.000,00	16.248.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	171.500.000,00	169.620.350,00	(1.879.650,00)	98,90
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	45.050.000,00	44.811.765,00	(238.235,00)	99,47
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	19.200.000,00	19.027.200,00	(172.800,00)	99,10
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	133.500.000,00	129.453.250,00	(4.046.750,00)	96,97
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	220.500.000,00	193.875.000,00	(26.625.000,00)	87,93
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.000.000,00	10.800.000,00	(10.200.000,00)	51,43
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	189.000.000,00	172.575.000,00	(16.425.000,00)	91,31
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	437.450.000,00	434.972.140,00	(2.477.860,00)	99,43
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	376.450.000,00	375.043.140,00	(1.406.860,00)	99,63
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	49.200.000,00	48.129.000,00	(1.071.000,00)	97,82
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	198.700.000,00	(1.300.000,00)	99,35
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000,00	198.700.000,00	(1.300.000,00)	99,35
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	500.000.000,00	487.300.000,00	(12.700.000,00)	97,46
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	200.000.000,00	197.400.000,00	(2.600.000,00)	98,70
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	300.000.000,00	289.900.000,00	(10.100.000,00)	96,63
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.666.015.785,00	1.549.521.888,00	(116.493.897,00)	93,01
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	292.910.000,00	236.671.888,00	(56.238.112,00)	80,80
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	223.110.000,00	167.146.888,00	(55.963.112,00)	74,92
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	61.800.000,00	61.525.000,00	(275.000,00)	99,56
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.373.105.785,00	1.312.850.000,00	(60.255.785,00)	95,61
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	450.000.000,00	395.400.000,00	(54.600.000,00)	87,87
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	543.099.300,00	539.250.000,00	(3.849.300,00)	99,29

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	380.006.485,00	378.200.000,00	(1.806.485,00)	99,52
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.636.908.200,00	1.525.853.502,00	(111.054.698,00)	93,22
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.636.908.200,00	1.525.853.502,00	(111.054.698,00)	93,22
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.546.027.200,00	1.439.632.658,00	(106.394.542,00)	93,12
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	44.933.000,00	40.661.326,00	(4.271.674,00)	90,49
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	45.948.000,00	45.559.518,00	(388.482,00)	99,15
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	226.750.000,00	226.501.504,00	(248.496,00)	99,89
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	226.750.000,00	226.501.504,00	(248.496,00)	99,89
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	83.500.000,00	83.262.064,00	(237.936,00)	99,72
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	143.250.000,00	143.239.440,00	(10.560,00)	99,99
5.1.05	Belanja Hibah	4.037.000.000,00	3.479.500.000,00	(557.500.000,00)	86,19
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.037.000.000,00	3.479.500.000,00	(557.500.000,00)	86,19
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.529.000.000,00	1.971.500.000,00	(557.500.000,00)	77,96
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.529.000.000,00	1.971.500.000,00	(557.500.000,00)	77,96
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.508.000.000,00	1.508.000.000,00	0,00	100,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.508.000.000,00	1.508.000.000,00	0,00	100,00
5.2	BELANJA MODAL	1.657.567.000,00	1.306.100.560,00	(351.466.440,00)	78,80
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	967.197.000,00	622.999.060,00	(344.197.940,00)	64,41
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	10.000.000,00	9.998.880,00	(1.120,00)	99,99
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	10.000.000,00	9.998.880,00	(1.120,00)	99,99
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	10.000.000,00	9.998.880,00	(1.120,00)	99,99
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	456.550.000,00	385.701.750,00	(70.848.250,00)	84,48
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	450.550.000,00	379.707.750,00	(70.842.250,00)	84,28
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	450.550.000,00	379.707.750,00	(70.842.250,00)	84,28
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.000.000,00	5.994.000,00	(6.000,00)	99,90
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	6.000.000,00	5.994.000,00	(6.000,00)	99,90
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	228.100.000,00	227.298.430,00	(801.570,00)	99,65
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	228.100.000,00	227.298.430,00	(801.570,00)	99,65
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	215.000.000,00	214.299.430,00	(700.570,00)	99,67
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	12.500.000,00	12.399.000,00	(101.000,00)	99,19
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00
5.2.02.08.08.0015	Belanja Modal Photo and Film Equipment	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	272.347.000,00	0,00	(272.347.000,00)	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	199.350.000,00	0,00	(199.350.000,00)	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	189.350.000,00	0,00	(189.350.000,00)	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	72.997.000,00	0,00	(72.997.000,00)	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	72.997.000,00	0,00	(72.997.000,00)	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	438.730.000,00	435.912.000,00	(2.818.000,00)	99,36
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	438.730.000,00	435.912.000,00	(2.818.000,00)	99,36
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	438.730.000,00	435.912.000,00	(2.818.000,00)	99,36
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	408.730.000,00	406.312.000,00	(2.418.000,00)	99,41
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	29.600.000,00	(400.000,00)	98,67
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.640.000,00	147.900.000,00	(3.740.000,00)	97,53
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	151.640.000,00	147.900.000,00	(3.740.000,00)	97,53
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	151.640.000,00	147.900.000,00	(3.740.000,00)	97,53
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	151.640.000,00	147.900.000,00	(3.740.000,00)	97,53
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	99.289.500,00	(710.500,00)	99,29
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.289.500,00	(710.500,00)	99,29
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.289.500,00	(710.500,00)	99,29
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	100.000.000,00	99.289.500,00	(710.500,00)	99,29